

Judul : Percepat hilirisasi, jangan takut WTO
Tanggal : Rabu, 14 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ekspor Bahan Nikel Dilarang Percepat Hilirisasi, Jangan Takut WTO

ANGGOTA Komisi VII DPR Rofik Hananto mendukung langkah Presiden Jokowi yang akan melanjutkan hilirisasi nikel, di tengah ancaman gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel.

Rofik menilai, larangan ekspor bahan mentah nikel penting untuk pengembangan hilirisasi sehingga memiliki nilai tambah yang besar di dalam negeri.

"Pemerintah juga harus membangun *smelter* untuk mempercepat pengembangan hilirisasi komoditas nikel," ujar Rofik, kemarin.

Politikus PKS ini mendukung Pemerintah Indonesia tetap menolak pembukaan ekspor bijih nikel meski nantinya akan kalah pada sidang WTO.

"Langkah ini diambil Pemerintah agar Indonesia tak melulu jadi sapi perah bagi komoditas nikel," kata dia.

Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin menambahkan, ketegasan Presiden Jokowi di landasi oleh amanah konstitusi untuk dapat mengoptimalkan dan mengembangkan hilirisasi komoditas nikel.

"Suatnya kita optimalkan sumber daya alam kita sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi," ujar Mukhtarudin, kemarin.

Dia bilang, ketegasan Presiden Jokowi ini menjadi kode keras kepada Kementerian BUMN agar lebih proaktif dan progresif untuk mencari mitra usaha dengan mengedepankan kepentingan nasional.

"Dalam hal ini, investor luar negeri tentu tetap mengedepankan kepentingan nasional kita," ucap Politisi Partai Golkar ini.

Menurut Mukhtarudin, kebijakan larangan ekspor ini tak hanya kepada bahan mentah bijih nikel, juga ekspor komoditas seperti tembaga. "Tinggal bagaimana strategi kita untuk *support* kebijakan itu," jelasnya.

Anggota Bangkar DPR ini mengatakan, Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman negara-negara Eropa yang akan membawa masalah ini ke organisasi perdagangan dunia.

Karena kedaulatan bangsa jauh lebih penting dari ancaman atau tekanan WTO.

"Pelarangan ekspor bahan mentah ini sangat tepat untuk memperlihatkan kedaulatan Indonesia, sebagai sebuah negara yang kuat, juga membuka lapangan kerja," tegasnya.

Sementara, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penutupan keran ekspor berpotensi dibuka kembali jika Pemerintah kalah dalam sidang WTO. Hal tersebut tentu akan menjadi masalah yang cukup serius di kemudian hari.

Menurut Bhima, jika Indonesia kalah di WTO konsekuensinya paling tidak harus membayar kompensasi kepada pihak yang memenangkan gugatan. Adapun nilai kompensasi yang harus dibayarkan tersebut tidaklah sedikit.

Selain kompensasi, implementasi hasil gugatan WTO berkorelasi dengan dibukanya kembali keran ekspor bijih nikel ke perusahaan di Eropa," ujar Bhima.

Bhima menyebut, membuka ekspor bijih nikel merupakan suatu kebijakan yang blunder bagi daya tarik investasi, terutama perusahaan China di proyek *smelter*. Mengingat 50 persen lebih penguasaan *smelter* nikel di Indonesia oleh investor China.

Dampak lainnya jika Pemerintah kalah, lanjut dia, bakal berimbas pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Salah satu komponen penting dalam pengembangan kendaraan listrik yakni terdapat pada sisi baterai.

Sedangkan Indonesia mempunyai ambisi untuk menjadi produsen baterai nomor satu dunia.

"Angan-angan itu diproyeksikan pupus jika benar nanti Uni Eropa memenangkan gugatan itu," wanti-wanti dia.

Sebagai informasi, Pemerintah melarang ekspor bijih nikel ini dimulai sejak 1 Januari 2020, dan keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Presiden Jokowi menyampaikan, penghentian ekspor nikel menjadi semangat memperbaiki tata kelola tambang di Tanah Air. ■ TIF